



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH



# RENJA BIRO ORGANISASI

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, merupakan bahan masukan dalam rangka menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran, serta skala prioritas pembangunan tahunan.

Rencana kerja (Renja) ini mengacu kepada :

- a. Arah Pembangunan yang tertuang dalam pentahapan RPJP-D Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
- b. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- c. Melaksanakan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas, baik dari instansi terkait di Kabupaten/Kota maupun stakeholder lainnya yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dirangkum dalam suatu rencana kerja, dan rencana kerja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan selanjutnya pada pasal 139 dinyatakan bahwa Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, sehubungan hal tersebut Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, dengan melalui suatu proses atau tahapan antara lain Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024, mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja seperti peraturan perundang-undangan dan panduan atau pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan sesuatu rencana kerja biro organisasi tahun 2024.

## Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
14. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2022-2026
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2024 ini adalah untuk petunjuk arah atau pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Biro Organisasi Tahun 2024.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2024 ini dalam rangka menetapkan program/kegiatan Biro Organisasi Tahun 2024 untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2024 ini, disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****BAB V PENUTUP**

## B A B II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi, dan selama tahun 2022 Biro Organisasi telah melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan untuk mendukung 2 (dua) program. Capaian Kinerja Program Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1 Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.**

Untuk tahun anggaran 2022 secara umum Biro Organisasi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan kegiatan 97.17% dan untuk realisasi fisik 100%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak tercapai tersebut adalah :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pada Program ini terdapat 2 (sub) sub kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu :

##### **1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan karena sudah penuhnya kuota diklat dari BKN sehingga tidak dapat dilaksanakan di tahun ini dan dianggarkan untuk tahun berikutnya.



## 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**  
Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan karena Biro Organisasi tidak menggunakan paket zoom meeting.

## 2. *Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan*

Pada tahun anggaran 2022 program,kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi ada yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Adapun Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah memenuhi target tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

#### 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp.11.976.600,- dan yang terealisasi Rp. 11,672,700,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 97,46% dan fisik 100%.

#### 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 65,580,000,- dan yang terealisasi Rp. 65,580,000,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 100% dan fisik 100%.

- **Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 51,560,094,- dan yang terealisasi Rp. 47,371,316,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 91,88% dan fisik 100%.

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

#### - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 2,239,700,- dan yang terealisasi Rp. 2,178,000,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 97.25% fisik 100%.

### 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 20,154,400,- dan yang terealisasi Rp. 19,828,000,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 98.38% fisik 100%.

#### - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 38,668,445,- dan yang terealisasi Rp. 38,394,000,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% , realisasi anggaran 99.29% fisik 100%.

#### - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 35,024,923,- dan yang terealisasi Rp. 34.922,500,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 99,71% fisik 100%.

#### - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 441,320,92,- dan yang terealisasi Rp. 429,526,096,- dengan persentase Capaian Kinerja 86% realisasi anggaran 97,33% fisik 100%.

## **5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

### **- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 154,773,480,- dan yang terealisasi Rp. 123,499,000,- dengan persentase Capaian Kinerja 240% realisasi anggaran 79.79% fisik 100%.

## **6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

### **- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 45,541,350,- dan yang terealisasi Rp. 43,133,309,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 94.71% fisik 100%.

## **7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan yang terealisasi Rp. 39,154,500,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 99,91% fisik 100%.

### **- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 34.100.000,- dan yang terealisasi Rp. 33.976.250,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 99,64% fisik 100%.

**b. Program Penataan Organisasi****1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan****- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 380,767,114,- dan yang terealisasi Rp. 375,820,305,- dengan persentase Capaian Kinerja 500% realisasi anggaran 98,70% fisik 100%.

**- Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Kab/Kota**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 602,650,000,- dan yang terealisasi Rp. 582,715,021,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 96.69% fisik 100%.

**- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 356,043,450,- dan yang terealisasi Rp. 342,321,220,- dengan persentase Capaian Kinerja 125% realisasi anggaran 96.15% fisik 100%.

**2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja****- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksaaan Reformasi Birokrasi**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 305,755,000,- dan yang terealisasi Rp. 299,318,940,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 97,90% fisik 100%.

**- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 339,276,047,- dan yang terealisasi Rp. 337,696,328,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 99.53% fisik 100%.

**- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 119,095,650,- dan yang terealisasi Rp. 117,600,833,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 98.74% fisik 100%.

- **Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 234,138,134,- dan yang terealisasi Rp. 230,111,986,- dengan persentase Capaian Kinerja paling tinggi 950% realisasi anggaran 98.28% fisik 100%.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik**

Tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp. 522,714,523,- dan yang terealisasi Rp. 517,883,343,- dengan persentase Capaian Kinerja 100% realisasi anggaran 99,08% fisik 100%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table TC. 29. sebagai berikut ini :

**TABEL T-C.29.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI DAN PENCAPAIAN RENSTRA BIRO ORGANISASI S/D TAHUN 2023**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

BIRO ORGANISASI											
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH</b>										
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sinkronasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	-	10 Dokumen	100%
			Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
	b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
	c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
	d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	6 Orang	6 Orang	10 Orang	6 Orang	60	11 Orang	17 Orang	283%
	b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	2 Laporan	200%
	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-
	d	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	-	-	-	-	-	12 Dokumen	-	-
	e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
	f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-
	3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	-	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	-
	c	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
	d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah					1 Dokumen			
	4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Bimtek	1 Bimtek	100%	
	5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	100			
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 bahan komponen	3 bahan komponen	12 bulan	3 bahan kompone	-	10 Bahan	13 Bahan	433%
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 cetakan	7 cetakan	12 bulan	7 cetakan	-	5 Barang	12 Barang	171%
	d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 dokumen	86 Dokumen	1 dokumen	86 Dokumen	8600	100 Laporan	186 Laporan	186%
	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya baru	5 Unit	12 unit	5 Unit	12 unit	240	35 Unit	47 Unit	940%
	b	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel baru yang disediakan	-	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	#VALUE!
	7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-surat masuk dan surat - surat keluar dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	500 Surat	512 Surat	4267%
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon / fax yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	200%
			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	-
	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200%</b>	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumla Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 unit	100	1 Unit	2 Unit	200%
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 Unit	3 unit	3 Unit	3 unit	100	1 Unit	4 Unit	133%
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22 Unit	13 unit	22 Unit	13 unit	59	10 Unit	23 Unit	105%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	II PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk	100	100	100	100	100	100	200	200%
		Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100	100	100	100	100	100	200	200%
		Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	200	200%
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	8 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	525	8 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	625%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100	8 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	200%
		Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	7 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	171	7 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	271%
	9 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100	200	200%
		Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	200	200%
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100	200	200%
	a Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Ranperda / Ranpergub	5 Ranperda/Ranpergub	1 Ranperda / Ranpergub	5 Ranperda /Ranpergub	500	1 Ranperda /Ranpergub	6 Ranperda/Ranpergub	600%
	b Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80%	100%	1 Dokumen	100%	-	80%	180%	-
	c Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat daerah yang telah dilaksanakan Penataan Jabatan	80%					80%	80%	-
		Persentase perangkat daerah yang telah dibina Penataan Jabatan	80%	100%	1 laporan	100%	-	80%	100	
	10 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	8 Perangkat daerah	42 Perangkat daerah	8 Perangkat daerah	42 Perangkat daerah	525	16 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	725%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	8 Perangkat daerah	8 Perangkat daerah	8 Perangkat daerah	8 Perangkat daerah	100	10 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	225%
		Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	7 Perangkat daerah	12 Perangkat daerah	7 Perangkat daerah	12 Perangkat daerah	171	9 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	300%
	a Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Road Map RB	104 Orang	-	30 Orang	-	-	104 Orang	104 Orang	100%
		Jumlah Kab/Kota yang dibina/asistensi						19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	-
		Jumlah Bimtek Pokja 8 Area Perubahan						30 Orang	30 Orang	-
		Pergub Road Map RB Pemprov Sumbar 2021-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Monev Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbar 2021-2026					1 Dokumen	1 Dokumen	-	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistansi Dokumen SAKIP-nya	2 kab / Kota	- Kali	2 Kali	- Kali	-	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100%
			Jumlah Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali					2 Kali	2 Kali	100%
			Jumlah Peserta Pencanangan Komitmen Bersama 'Pemprov Sumbar Akuntabel'	130 Orang	130 orang	130 orang	130 orang	100		130 Orang	100%
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP						51 OPD	51 OPD	-
			Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov.Sumbar						110 Orang	110 Orang	-
	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja	1 Pergub				51 OPD		0	
			Jumlah Peserta Launching ASN BerAKHLAK	102 Peserta							
			Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub Budaya Kerja	60 Orang	102 Peserta	100 Peserta	102 Peserta	102		102 Peserta	170%
			Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat						51 OPD /19 Kab/Kota	51 OPD /19 Kab/Kota	
	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	4 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	950	8 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	1150%
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan SOP	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100	8 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	300%
			Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota	6 kab / Kota	18 Kab/Kota	6 kab / Kota	18 Kab/Kota	300	7 Perangkat Daerah	25 Kab/Kota	417%
			Peserta Rapat Koordinasi Organisasi Kabupaten/Kota						112 Orang	112 Orang	-
	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi layanan publik yang dibina	20 Inovasi	-	50 Inovasi	-	-	-	0	0%
			Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	50 UKPP	52 UKPP	50 UKPP	50 UKPP	100	70 UKPP	122 UKPP	244%
			Jumlah UKPP yang dimonitoring Digitalisasi Pelayanan Publik	50 UKPP	20 UKPP	20 UKPP	20 UKPP	100		20 UKPP	40%
			Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP	20 UKPP	20 UKPP	20 UKPP	20 UKPP	100	30 UKPP	50 UKPP	250%
			Jumlah UKPP yang menerapkan standar pelayanan	20 UKPP					30 UKPP	30 UKPP	150%
			Jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi	20 UKPP	27 UKPP	20 UKPP	20 UKPP	100	30 UKPP	57 UKPP	285%
		Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik					110 Orang	110 Orang	-		

Berdasarkan uraian diatas terhadap program kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum dikarenakan adanya pemakaian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bukan merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ombudsmen Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan Biro Organisasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termasuk Zona Hijau, dan untuk meningkatkan fungsi- fungsi pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Organisasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 dan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Berdasarkan perencanaan strategis biro organisasi dari visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan diwujudkan untuk 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan
5. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas
6. Penataan tatalaksana yang efektif

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
8. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Untuk tahun 2022 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
			Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	8	8	100
		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12.5	12.55	100,4
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1.78	1.97	110.67
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi	7	12	171.43

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Publik	berkualitas	secara nasional			
		Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	12	42	350
5	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80.01)	A (80.68)	100.84
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80.00 Baik	80.39 Baik	100.49
<b>Jumlah Capaian 8 Sasaran Biro Organisasi</b>						<b>1133,83</b>
<b>Rata - rata capaian indikator kinerja .....</b>						<b>141,73</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 8 (delapan) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 9 (sembilan) indikator kinerja sebesar 141,73 %.

Untuk dapat melihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

**Tabel T-C. 30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO ORGANISASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA SKPD (TAHUN)						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran												
	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kab/Kota yg OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat												
	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A			7	8	10	12	14	16	6	8	10	12
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah												
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah			11,7	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3		12,55	12,7	12,9
4	Meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan	-	-										
	Hasil penilaian mandiri Area Manajemen Perubahan			1,71	1,78	1,85	1,89	1,93	2,00	1,66	1,97	1,85	1,89
5	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas												
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara Nasional			5	7	9	11	13	15	8	12	9	11
6	Penataan tatalaksana yang efektif	-	-										
	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan			8	12	16	18	20	22	12	42	16	18
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi												
	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			BB (75,66)	BB (78)	BB (80)	A (81,00)	A (82,00)	A (84,00)	BB (72,22)	A (80,68)	BB (80)	A (81,00)
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi												
	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi			-	B (80)	B (86)	A (88)	A (90)	A (95)	-	80,39 Baik	B (86)	A (88)

## 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar perangkat daerah/unit kerja yang terbentuk sesuai dengan dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan daerah dan secara optimal mencapai kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah mempunyai pedoman yang benar dan jelas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 34, 35, 36, 37 dan 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Datuak Tan Pari dan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Yang menjadi permasalahan dalam penataan dan penguatan kelembagaan antara lain:

- a. Penerapan kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi tidak dilaksanakan secara tuntas namun dilaksanakan secara bertahap serta belum siapnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini, sehingga menyebabkan kebingungan dalam aplikasinya. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tahapan dan kedua dari proses

penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021. Kemudian pada awal tahun 2022 Pemerintah melalui Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan baru yaitu proses penyetaraan jabatan tahap II dan dilaksanakan paling lambat akhir Mei 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merespon kebijakan tersebut dan telah tuntas melaksanakan seluruh tahapan penyederhaan struktur dan penyetaraan jabatan secara efektif sejak Januari 2022. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya ketentuan yang mengatur transformasi sistem kerja berdasarkan konsep kebijakan penyederhanaan birokrasi. Barulah pada akhir Maret 2022 Pemerintah menerbitkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan ini terbit setelah Pergub tentang SOTK pasca penyetaraan jabatan ditetapkan. Padahal akibat diterbitkannya Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 tersebut mengakibatkan sebagian pasal dari Permenpan 17 Tahun 2021, yang menjadi dasar dalam Pergub tentang SOTK dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi para penyelenggara pemerintahan khususnya yang terdampak dari kebijakan penyetaraan jabatan ini.

- b. Terbatasnya waktu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 sangat terbatas (31 Desember 2021)
- c. Tidak adanya pedoman teknis yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur terkait Penyederhanaan Struktur pada Pemerintah Daerah mengakibatkan tim fasilitasi penataan kelembagaan provinsi mengalami kesulitan dalam merumuskan draft Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah yang komprehensif dan ideal.

- d. Masih banyak jenis jabatan fungsional yang belum tersedia dan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan. Sehingga terhadap pelaksanaan tugas yang belum ada jabatan fungsional dipaksakan untuk dilekatkan pada jabatan fungsional yang memiliki karakteristik yang mirip.

## **2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

### ***a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik***

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah adanya penambahan pelaksanaan kegiatan terutama dalam penataan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan hasil yang diperoleh terpilihnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. anggaran pelaksanaan kegiatan menjadi permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta mengganggu pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan menggunakan Aplikasi SP4N-Lapor, sehingga masyarakat dapat penyampaian keluhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik kapan saja dan dimana saja masih belum dianggap penting dan strategis oleh penyelenggara pelayanan. hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.



**b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik***

Permasalahan yang ada dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

**c. *Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis***

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian telah dilakukan penyusunan peta proses di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten. Implementasi ini tidak hanya terkait dengan kualitas dokumen SAKIP tetapi juga integrasi dan implementasinya. Hal yang sangat mempengaruhi SAKIP adalah komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam mengimplementasikan SAKIP masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
- b. Masih perlunya perbaikan kualitas perencanaan dan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
- c. Belum maksimalnya Sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.
- d. Monitoring dan evaluasi internal masih belum dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah
- e. Masih belum dilakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Masih belum samanya pemahaman evaluator tentang SAKIP
- g. Belum semua perangkat daerah mempedomani Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.

#### **4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026, sesuai dengan tahun RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Road map Reformasi Birokrasi ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan mulai tahun 2021. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Biro Organisasi juga melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi untuk kabupaten/kota melalui kegiatan asistensi reformasi birokrasi ke kabupaten/kota untuk mengetahui permasalahan reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten/kota dan sharing solusi yang mungkin dilaksanakan agar kegiatan reformasi birokrasi tetap terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dijumpai permasalahan sebagai berikut;

1. Susahnya mendapatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena kegiatan mereka yang padat.
2. Permintaan data reformasi birokrasi ke OPD susah mendapatkannya sehingga dalam pengisian LKE perlu dilakukan konfirmasi ulang ke SKPD.

3. Realisasi rencana tindak agen perubahan masih belum jelas sehingga susah juga menetapkan apa perubahan apa yang telah dilaksanakannya terkait 8 area perubahan reformasi birokrasi.
4. Asesor internal telah terbentuk namun belum melaksanakan tugas secara optimal.
5. Belum terbiasanya Tim PPRB menyusun rencana tindak hasil evaluasi reformasi birokrasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukan perumuskan indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yaitu terutama pemahaman aparatur tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta belum memahaminya bagaimana proses penyusunan suatu Standar Operasional Prosedur. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian bimbingan langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik masih ditemui hambatan – hambatan diantaranya adanya pengaduan masyarakat yang berulang – ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggarkan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey

Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan Usaha mengatasinya adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaian kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

**TABEL T-C.31.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAMA SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SUMBAR

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH				4.706.264.000	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH				4.726.264.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	1.641.264.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	1.641.264.000
1	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	25.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	25.000.000
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	10.000.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	10.000.000
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	7.500.000
	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	5 Dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	5 Dokumen	7.500.000
2	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	108.000.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	108.000.000
	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	24 Dokumen	100.000.000	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	24 Dokumen	100.000.000
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	6 Orang				Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	6 Orang	
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	2 Dokumen	8.000.000	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	2 Dokumen	8.000.000
3	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	26.000.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	26.000.000
	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah BMD yang diasuransikan	1 Unit	10.000.000	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah BMD yang diasuransikan	1 Unit	10.000.000

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	12 Dokumen	6.000.000	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	12 Dokumen	6.000.000
				Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	1 Orang					Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	1 Orang	
	c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
				Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	2 Dokumen					Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	2 Dokumen	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	150.000.000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	150.000.000
	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll (baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang diikuti oleh aparatur Perangkat Daerah)	31 Orang	150.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll (baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang diikuti oleh aparatur Perangkat Daerah)	31 Orang	150.000.000
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	945.000.000	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	945.000.000
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	50.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	50.000.000
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Unit	200.000.000	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Unit	200.000.000
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Bahan	50.000.000	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Bahan	50.000.000
				Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	24 Rapat					Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	24 Rapat	
	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis Barang	35.000.000	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis Barang	35.000.000
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	600.000.000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	600.000.000
	g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	1 Arsip	5.000.000	g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	1 Arsip	5.000.000

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	185.000.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	185.000.000
	a Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Mebel	10 Set	100.000.000	a	Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Mebel	10 Set	100.000.000
	b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	3 Unit	50.000.000	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	3 Unit	50.000.000
	c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	1 Unit	35.000.000	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	1 Unit	35.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.000.000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.000.000
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	1000 Surat	13.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	1000 Surat	13.000.000
	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	75.000.000	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	75.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	114.264.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	114.264.000
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 Unit	75.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 Unit	75.000.000
	b Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	15 Unit	19.264.000	b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	15 Unit	19.264.000
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	20.000.000	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	20.000.000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Provinsi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk	100%	3.065.000.000	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Provinsi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk	100%	3.085.000.000	
			Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%				Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%		
			Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%				Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	12 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	12 Perangkat Daerah		



No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
			Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah				Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah		
9	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk	100%	1.160.000.000	9	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk	100%	1.180.000.000
			Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%				Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%		
	a Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi	Jumlah Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	380.000.000	a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi	Jumlah Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	400.000.000
	b Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang dikeluarkan	36 Dokumen	390.000.000	b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang dikeluarkan	36 Dokumen	390.000.000
	c Penataan Analisis Jabatan	Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%	390.000.000	c	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%	390.000.000
			Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina Penataan Jabatan	80%					Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina Penataan Jabatan	80%	
10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah	1.905.000.000	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah	1.905.000.000
			Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	12 Perangkat Daerah					Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)	12 Perangkat Daerah	
			Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah					Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah	
	a Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemprov	Jumlah Kab/Kota yang dibina / asistensi	18 Kab/Kota	330.000.000	a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemprov	Jumlah Kab/Kota yang dibina / asistensi	18 Kab/Kota	330.000.000
			Jumlah Peserta Sosialisas RB di lingkungan Pemprov Sumbar	102 Orang					Jumlah Peserta Sosialisas RB di lingkungan Pemprov Sumbar	102 Orang	
			Jumlah Peserta Sosialisasi RB Kab/Kota	114 Orang					Jumlah Peserta Sosialisasi RB Kab/Kota	114 Orang	
			Bimtek RB Tematik	80 Orang							
	b Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	360.000.000	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	360.000.000
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen					Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya	2 Kab/Kota					Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya	2 Kab/Kota	
			Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali					Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali	
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP	51 OPD					Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP	51 OPD	

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
			Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar	110 Orang				Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar	110 Orang			
	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Povinsi	Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	142 Peserta	135.000.000	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Povinsi	Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	142 Peserta	135.000.000
				Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Kab/Kota	19 Kab/Kota					Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Kab/Kota	19 Kab/Kota	
	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Povinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis	10 Perangkat Daerah	380.000.000	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Povinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis	10 Perangkat Daerah	380.000.000
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP	10 Perangkat Daerah					Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP	10 Perangkat Daerah	
				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah					Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	
	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Povinsi	Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik	150 Orang	700.000.000	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Povinsi	Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik	150 Orang	700.000.000
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	70 UKPP					Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	70 UKPP	
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP	30 UKPP					Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP	30 UKPP	
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	30 UKPP					Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	30 UKPP	
				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	30 UKPP					Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	30 UKPP	

Berdasarkan data pada tabel T.C 31 di atas, perbandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan analisis kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, sudah tidak terdapat perbedaan anggaran yang signifikan. Dimana dari tabel kebutuhan tahun 2024 sedikit lebih besar dibanding rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan selisih sebesar Rp. 20.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sudah hampir mengakomodir kebutuhan yang sesungguhnya dari masing-masing pelaksana kegiatan pada Biro Organisasi, sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan penyesuaian pencapaian target indikator kinerja yang telah direncanakan. Penambahan anggaran berdasarkan hasil analisa kebutuhan hanya terjadi pada program Penataan Organisasi terutama pada kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Penataan Kelembagaan Provinsi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perencanaan Strategis Biro Organisasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat baik melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun melalui aplikasi pengelola pengaduan pelayanan publik yang diterapkan secara nasional yaitu Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis SP4N-LAPOR. dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

**TABEL T.C 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	4	5
				<b>4.706.264.000</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.641.264.000</b>
	1 <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10.000.000
			Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	7.500.000
	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	7.500.000
	2 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>108.000.000</b>
	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	100.000.000
			Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	8.000.000
	3 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>26.000.000</b>
	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah BMD yang diasuransikan	10.000.000
	b Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	6.000.000
			Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2		3	4	5
		c Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	10.000.000
				Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	
	4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
		a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll (baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang diikuti oleh aparatur Perangkat Daerah)	150.000.000
	5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>945.000.000</b>
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.000.000
		b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50.000.000
		c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	200.000.000
		d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50.000.000
				Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	
		e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	35.000.000
		f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	600.000.000
		g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	5.000.000
	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</b>	<b>185.000.000</b>
		a Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Mebel	100.000.000
		b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	50.000.000
		c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	35.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2		3	4	5
	7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.000.000</b>
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah Surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	13.000.000
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	75.000.000
	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>	<b>114.264.000</b>
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	75.000.000
	b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	19.264.000
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	<b>II PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk</b>	<b>3.065.000.000</b>
				<b>Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan</b>	
				<b>Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah</b>	
				<b>Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis</b>	
				<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)</b>	
				<b>Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik</b>	
	9	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Provinsi Sumbar</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk</b>	<b>1.160.000.000</b>
				<b>Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan</b>	
	a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Sumbar	Jumlah Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	380.000.000
	b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Sumbar	Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang dikeluarkan	390.000.000
	c	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Sumbar	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	390.000.000
				Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina Penataan Jabatan	

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2		3	4	5
	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Sumbar	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01) Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	1.905.000.000
	a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Sumbar	Jumlah Kab/Kota yang dibina / asistensi Jumlah Peserta Sosialisasi RB dilingkungan Pemprov Sumbar Jumlah Peserta Sosialisasi RB Kab/Kota Bimtek RB Tematik	330.000.000
	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar	360.000.000
	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Sumbar	Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Kab/Kota	135.000.000
	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Sumbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota	380.000.000



No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2			3	4	5
		e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Sumbar	Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	700.000.000

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang akan ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 salah satunya Misi ke 7 (tujuh) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel serta berkualitas”*** dengan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah Daerah yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan perubahan pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, dengan memantapkan implementasi SAKIP.
2. Penerapan *e-government* .
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
5. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi dan monitoring dari peraturan gubernur dengan harapan dapat

mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing – masing OPD.
- b. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan serta penyusunan peta proses bisnis.
- c. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.
- d. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.
2. Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
4. Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindih fungsi antar OPD.
5. Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.
6. Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.
7. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implentasinya di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (TUJUAN DI RENSTRA)**

#### **3.2.1. Tujuan**

- a. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- e. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

#### **3.2.2. Sasaran**

- Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan
- Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas
- Penataan tatalaksana yang efektif
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

#### **a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2024 disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro Organisasi.

#### **b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

2. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi dan ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
3. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Total Kebutuhan dana **Rp. 4.706.264.000,-**

Rincian Program/kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33. berikut ini.

**TABEL T-C.33.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH								4.706.264.000				4.872.735.000	
4	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi	100%	1.641.264.000	APBD	-	100%	1.622.264.000
4	01	01	1	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	Provinsi	100%	25.000.000	APBD		100%	25.000.000
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi	6 Dokumen	10.000.000	APBD		6 Dokumen	10.000.000
							Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Provinsi	4 Dokumen				4 Dokumen	
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	Provinsi	6 Dokumen	7.500.000	APBD		6 Dokumen	7.500.000
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Provinsi	5 Dokumen	7.500.000	APBD		5 Dokumen	7.500.000
4	01	01	1	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	Provinsi	100%	108.000.000	APBD		100%	108.000.000
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Provinsi	24 Dokumen	100.000.000	APBD		24 Dokumen	100.000.000
							Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah		6 Orang				6 Orang	
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	Provinsi	2 Dokumen	8.000.000	APBD		2 Dokumen	8.000.000
4	01	01	1	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	Provinsi	100%	26.000.000	APBD		100%	10.000.000
4	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Provinsi	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	01	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Provinsi	12 Dokumen	6.000.000	APBD		12 Dokumen	6.000.000
						Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	1 Orang		1 Orang					
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Provinsi	4 Dokumen	10.000.000	APBD		4 Dokumen	10.000.000
						Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen					
4	01	01	1	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Provinsi	100%	150.000.000	APBD	-	100%	150.000.000
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll	Provinsi	31 Orang	150.000.000	APBD		15 Kali	150.000.000
4	01	01	1	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Provinsi	100%	945.000.000			100%	940.000.000
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Provinsi	10 Jenis	5.000.000	APBD		7 Jenis	5.000.000
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Provinsi	15 Unit	50.000.000	APBD		8 Jenis	50.000.000
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Provinsi	30 Unit	200.000.000	APBD		70 Laporan	200.000.000
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi	3 Bahan	50.000.000	APBD		3 Bahan	50.000.000
						Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	24 Rapat		24 Rapat					
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi	3 Jenis Barang	35.000.000	APBD		3 Jenis Barang	35.000.000
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Provinsi	100 Laporan	600.000.000	APBD		100 Laporan	600.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	Provinsi	1 Arsip	5.000.000	APBD		1 Arsip	5.000.000
4	01	01	1	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan</b>	Provinsi	100%	185.000.000	APBD		100%	185.000.000
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Provinsi	10 Set	100.000.000	APBD		10 Set	100.000.000
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Provinsi	3 Unit	50.000.000	APBD		3 Unit	50.000.000
4	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Provinsi	1 Unit	35.000.000	APBD		1 Unit	35.000.000
4	01	01	1	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Provinsi	100%	88.000.000	APBD		100%	88.000.000
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	Provinsi	1000 Surat	13.000.000	APBD		1000 Surat	13.000.000
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Provinsi	2 Orang	75.000.000	APBD		2 Orang	75.000.000
4	01	01	1	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</b>	Provinsi	100%	114.264.000	APBD	-	100%	114.264.000
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Provinsi	4 Unit	75.000.000	APBD		4 Unit	75.000.000
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Provinsi	15 Unit	19.264.000	APBD		15 Unit	19.264.000
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	15 Unit	20.000.000	APBD	-	22 Unit	22.000.000
4	01	02				<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk</b>		100%	3.065.000.000	APBD		100%	3.250.471.000
							<b>Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan</b>		100%				100%	
							<b>Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah</b>		100%				100%	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis		18 Perangkat Daerah				20 Perangkat Daerah	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A(80,01)		12 Perangkat Daerah				14 Perangkat Daerah	
		Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan		11 Perangkat Daerah				13 Perangkat Daerah	
4	01 02 1 01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi	100%	1.160.000.000	APBD		100%	1.200.000.000
		Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan		100%				100%	
4	01 02 1 01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi	1 Ranperda/Ranpergub	380.000.000	APBD		1 Ranperda/Ranpergub	400.000.000
4	01 02 1 01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi	36 Dokumen	390.000.000	APBD		40 Dokumen	400.000.000
4	01 02 1 01 03	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi	80%	390.000.000	APBD		100%	400.000.000
			Provinsi	80%				100%	
4	01 02 1 02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	18 Perangkat Daerah	1.905.000.000	APBD		20 Perangkat Daerah	2.050.471.000
				12 Perangkat Daerah				14 Perangkat Daerah	
				11 Perangkat Daerah				13 Perangkat Daerah	
4	01 02 1 02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi	18 Kab/Kota	330.000.000	APBD		18 Kab/Kota	340.471.000
				102 Orang				102 Orang	
				114 Orang				114 Orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025						
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					
4	01	02	1	02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	Provinsi	1 Dokumen	360.000.000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
							Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun		1 Dokumen				1 Dokumen	
							Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya		2 Kab/Kota				2 Kab/Kota	
							Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan		2 Kali				2 Kali	
							Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP		51 OPD				51 OPD	
							Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar		110 Orang				110 Orang	
4	01	02	1	02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	142 Peserta	135.000.000	APBD	Provinsi	142 Peserta	160.000.000
							Internalisasi ASN BerAKHLAK ASN Pemerintah Kab/Kota		19 Kab/Kota				19 Kab/Kota	
4	01	02	1	02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis	Provinsi	10 Perangkat Daerah	380.000.000	APBD		10 Perangkat Daerah	450.000.000
							Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP		10 Perangkat Daerah				10 Perangkat Daerah	
							Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota		7 Perangkat Daerah				7 Perangkat Daerah	
4	01	02	1	02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik	Provinsi	150 Orang	700.000.000	APBD		150 Orang	700.000.000
							Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		70 UKPP				70 UKPP	
							Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP		30 UKPP				30 UKPP	
							Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		30 UKPP				30 UKPP	
							Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetensi		30 UKPP				30 UKPP	

**B A B IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2024 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2024 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu khusus kepada misi 7 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	<b>PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		a	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
		a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
		a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		a	Pengadaan Mebel
		b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		b	Pemeliharaan Mebel

		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		
	9	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	
		a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
		b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		c	Penataan Analisis Jabatan
	10	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	
		a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
		d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
		e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 4,706,264,000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah)** untuk lebih jelasnya rincian rencana kerja Biro Organisasi tahun 2024 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		BESARAN / VOLUME
			<b>4,706,264,000</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1,641,264,000</b>
	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25,000,000</b>
		a   Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		BESARAN /
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,500,000
	c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000
	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>108,000,000</b>
	a	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	100,000,000
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8,000,000
	3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>26,000,000</b>
	a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000
	b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000
	c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000
	4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150,000,000</b>
	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000
	5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>945,000,000</b>
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200,000,000
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000
	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600,000,000
	g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000
	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>185,000,000</b>

No.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		BESARAN /
	a	Pengadaan Mebel	100,000,000
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000
	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,000,000
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>88,000,000</b>
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,000,000
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,000,000
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>114,264,000</b>
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75,000,000
	b	Pemeliharaan Mebel	19,264,000
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		<b>3,065,000,000</b>
9	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>		<b>1,160,000,000</b>
	a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	380,000,000
	b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	390,000,000
	c	Penataan Analisis Jabatan	390,000,000
10	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>1,905,000,000</b>
	a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	330,000,000
	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	360,000,000
	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	135,000,000
	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	380,000,000
	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	700,000,000

## B A B V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2024 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

1. Pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 9 (sembilan) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 141,73%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada peraturan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
  - b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan review SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.
  - c. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui



- perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Tahun 2022 pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis aplikasi SP4N – Laporan telah berjalan namun untuk lebih terlaksananya percepatan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pejabat penghubung yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - e. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - f. Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
  - g. Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.
  - h. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - i. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
    - 1) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Mepedomani rekomendasi dari evaluator KemenPAN RB untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.
- j. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

Padang, Februari 2023

**KEPALA BIRO ORGANISASI**



**FITRIATI M.S.Si, M.Si**

Pembina Utama Muda

19730513 199703 2 005